

**STUDY ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi
Sulawesi Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Serjana Ekonomi Islam (S.EI) Jurusan Ekonomi Islam
Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin
M a k a s s a r

Oleh

NUR ROSMIATI
NIM. 10200108045

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2012**

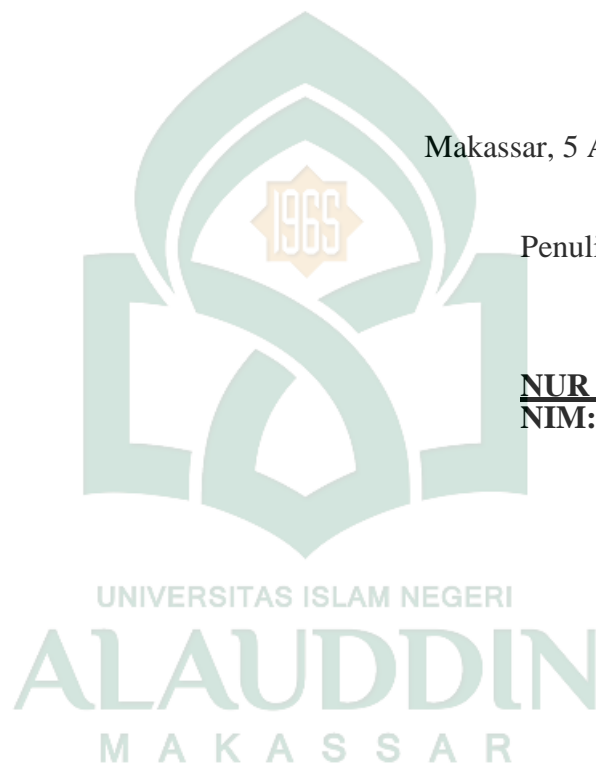
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 5 Agustus 2012

Penulis,

NUR ROSMIATI
NIM: 10200108045



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi ini Saudari Nur Rosmiati, NIM: 10200108045, Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar (Study Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan),”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan di sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 10 Agustus 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag.
NIP. 19710402 200003 1 002

Rahmawati Muin, S.Ag, M. Ag
NIP. 19760701200212 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan)”. Yang disusun oleh Saudari **Nur Rosmiati, NIM: 10200108045**, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis 15 Agustus 2012 M, bertepatan dengan 26 Ramadhan 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam dalam Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Ekonomi Islam.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, MA (.....)

Sekretaris : Drs. Hamzah Hasan, M.HI

(.....)

Munaqisy I : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag (.....)

Munaqisy II : Achmad Musyahid, S. Ag., M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag (.....)

Pembimbing II : Rahmawati Muin, S. Ag., M.Ag (.....)

Makassar, 15 Agustus 2012 M.

26 Ramadhan 1433 H

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar.

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA

Nip. 19570414 198603 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul

“Problematika Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan”. Yang disusun oleh Saudara **Mabrur Hasan, NIM: 10200108023**, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 17 September 2012 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam dalam Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Ekonomi Islam.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Parman, MA (.....)

Sekretaris : Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag (.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. H. Minhajuddin (.....)

Munaqisy II : Awaluddin, SE., M. Si (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (.....)

Pembimbing II : Rahmawati Muin, S. Ag., M. Ag (.....)

Makassar, 17 September 2012 M.

3 Dzulqa’dah 1433 H

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar.

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA

Nip. 19570414 198603 1 003



KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kemampuan berfikir untuk berbuat kepada manusia, sehingga mampu melangsungkan taraf hidup dan membuat peradaban dunia di atas muka bumi. Shalawat dan Taslim semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, atas akhlak mulia dan suri tauladan yang dimiliki, menjadikannya sebagai panutan bagi umat manusia sebagai *rahmatan lil-alamin*. Nabi yang membawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi umat, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang-benderang. Kedatangannya juga membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (*jahiliyah*) dan perbudakan, lalu mencerahkannya dengan kecerdasan fikiran dan ketundukan batin sehingga membuat manusia dan umatnya taat.

Atas segala kerendahan hati, penulis menghadirkan karya ilmiah ini tentu masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi yang berminat pada penelitian ini, yang berjudul : **“Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan).”**

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh banyak “*pelajaran*” tentang makna hidup di dunia, proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi untuk tetap melangkah menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak menjadi semangat tersendiri bagi penulis. Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Abd. Radjab. N dan Ibunda Nursiah, yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang tanpa adanya keluhan sedikit pun yang terucap terhadap penulis, tanpa adanya rasa lelah dengan penuh kesabaran dan keinginan yang luar biasa untuk tetap mendorong penulis menjadi orang yang seperti sekarang ini, juga atas berkat iringan do'a tulus dan ikhlas dari keduanya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada Mereka.
2. Bapak prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., MS. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
3. Bapak Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag. Selaku Pembimbing I penulis, di tengah kesibukan beliau selaku ketua jurusan Ekonomi Islam tetap menerima Penulis untuk berkonsultasi.
4. Ibu Rahmawati Muin, S. Ag. Selaku Pembimbing II Penulis, dan selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, yang sudi meluangkan waktunya untuk

membimbing dan memotivasi sehingga Penulis dapat merampungkan Skripsi ini. Banyak hal yang saya dapatkan dari Beliau, keilmuannya yang mendalam mengenai persoalan zakat.

5. Bapak Prof. Dr. Ali Parman. M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
6. Para Pembantu Dekan I, PD II, PD III, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.
7. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan dalam lingkungan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Rasmuddin, S. Ag, sebagai pelaksana harian yang memberikan data perusahaan, masukan dan saran kepada penulis. Seluruh pihak karyawan karyawan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Teman-teman di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dusun Bontorannu, Desa Ere Lembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, masing-masing : Mia, Uny, Ary, Rahma, dan Fitri yang telah memberikan motivasi-motivasi di lingkungan KKN selama dua bulan.
10. Teman-teman di Organisasi Ekstra kampus : Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM), yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk berekspresi dan berkreasi.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 08, Ifa, Ayu, Cindy, Mabrur, Tabah, Widha, Indah, Mimi, Rais, Tri, Uda, Mukhtar, Sukma, Zulhajj, Innah, Nirmala dan banyak lagi yang tidak saya sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih

atas segalanya sobat semoga langkah kita selalu di Ridhoi oleh Sang Kholik dan semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu dan di lain tempat.

12. Kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis yang hanya karena keterbatasan ruang hingga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon agar mereka yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin



Penulis

NUR ROSMIATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Definisi Operasional.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Garis Besar Isi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. ZAKAT.....	12
1. Pengertian Zakat.....	12
2. Macam-Macam Zakat.....	14
3. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	22
4. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	24
B. KEMISKINAN.....	25
1. Pengertian Kemiskinan.....	25
2. Jenis-Jenis Kemiskinan.....	26
3. Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan.....	27
C. PENGELOLAAN ZAKAT.....	30
1. Amil (Pengelola) Zakat.....	30
2. Pemerintah Sebagai Pengelola Zakat.....	32
3. Perencanaan Pengelola Dana Zakat.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Objek dan Tempat penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan	
Di Kota Makassar.....	50
C. Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan	
Di Kota Makassar.....	53
D. Kendala atau Hambatan Dalam Pengelolaan Zakat.....	65
 BAB V PENUTUP.....	 68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Nama : Nur Rosmiati

Nim : 10200108045

Jurusan : Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan)

Dalam skripsi ini pokok permasalahan yang dibahas yaitu: **Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan).** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di kota Makassar? 2. Bagaimana pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah komponen yang terlibat langsung dalam penerima bantuan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada pihak *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha, dan pihak Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penggambaran dengan kata-kata atau kalimat terhadap hasil penelitian dan kemudian di simpulkan.

Terjadinya kemiskinan di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah, Cara berfikir yang masih tradisional dan konservatif akan hal-hal yang baru, tidak seimbangnya orang yang datang di Kota Makassar dengan lowongan pekerjaan yang ada. Pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu dengan menyalurkan dana zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* secara *konsumtif*, yaitu bantuan yang langsung di konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* dengan berorientasi pada aspek produktif, yaitu penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya mesin jahit, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha yang dimiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Oleh karena itu, orang/badan usaha yang memiliki kecukupan kekayaan dan telah mencapai batas besarnya zakat (*nishab*) dan batas waktu setahun pemilikan harta (*haul*) harus mengeluarkan zakat (menjadi *muzakki*), dan ia harus menghitung dengan seksama yang harus dikeluarkan. Namun apabila tidak dapat menghitung sendiri, maka dapat meminta bantuan kepala Badan/Lembaga Amil Zakat tempat ia akan menyerahkan zakatnya.¹

Dalam agama Islam kita kenal dengan zakat yaitu salah satu dari rukun Islam yang lima. Pada hakikatnya zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT, untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemiliknya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.

¹Kementrian Agama, *Zakat* (Makassar: Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2010), h. 3.

Dengan berpegang kepada *aqidah* atau keyakinan yang dibentangkan oleh agama Islam bagi manusia, terbuka jalan untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebaikan di akhirat kelak, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini. Dan sejalan dengan hal tersebut, perlu diadakan Lembaga Zakat. Karena Lembaga inilah, di samping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatangi dan memperdekat hubungan kasih sayang antara manusia dan mewujudkan umat Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong.

Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin.²

Yang terpenting dari zakat, ia bukanlah suatu sistem sedekah yang bersifat anjuran. Gagasan ini fundamental zakat adalah pemberdayaan golongan miskin dan mereka yang membutuhkan secara ekonomis harus dimungkinkan bisa hidup agar dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya dari zakat tersebut.

Merupakan sebuah keprihatinan jika di negara kaya akan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, masih terdapat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Pengabaian dan ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan kaum lemah yang terbesar di seluruh

²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid 1 (Bairut: Muassasahal-Risalah, 1994), h. 42.

tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Aktifitas perekonomian masyarakat semakin hari menunjukkan frekuensi yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat di antaranya dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan ini tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa masyarakat membutuhkan segala pelayanan yang dapat menunjang aktifitasnya, di antaranya dapat menyalurkan zakat. Dengan menyalurkan zakat ini maka para penyalur zakat telah menjalankan salah satu rukun Islam yaitu membayar zakat.

Telah cukup lama dilakukan upaya pengorganisasian dan pengelolaan zakat di negeri kita. Ada yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung dengan mengatasnamakan organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu, bahkan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.³

Hasil pengumpulan zakat harus dibagi untuk mereka yang membutuhkan dan telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an. Orientasinya terutama untuk meningkatkan kesejahteraan golongan yang belum wajib membayar zakat, sehingga tidak akan mungkin hasil pengumpulan zakat akan kembali kepada pembayarnya.⁴

³Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu?* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h. 132.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal WaTamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 214.

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana Zakat.

Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik*, dan pengelola zakat yang tepat sasaran pada pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat.⁵

⁵Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasi Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 153.

Mengenai pengertian zakat yang sudah di kemukakan pada uraian terdahulu, yaitu hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan *mustahik* lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Sebagai mana diketahui, bahwa zakat adalah sumber pendapatan suatu daerah (negara Islam). Dan di kota Makassar, pada umumnya masyarakat langsung menyerahkan zakatnya kepada yang berhak (*mustahik*), atau menyerahkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar, atau lembaga-lembaga zakat lainnya.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis mencoba memilih judul skripsi dengan topik “Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan).” Dan untuk mendapatkan rumusan masalah yang terarah dari permasalahan pokok tersebut di atas berikut ini di kemukakan sub masalah yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di kota Makassar?
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar?

B. Ruang Lingkup dan Definisi Operasional

Dalam memberikan gambaran pengertian judul tersebut menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung di dalamnya, maka penulis mengemukakan pengertian dari skripsi ini yang berjudul “Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan”. Sehingga dapat memudahkan dan mengetahui maksud dan tujuan yang pokok dalam uraian ini, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

- a. Study, pelajaran, penyelesaian pelajaran, penyelidikan, mengadakan penyelidikan mengenai keadaan itu.⁶
- b. Analisis, penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan perbuatan dsb). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaahan bagian itu sendiri, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, dan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁷
- c. Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan setelah mendapat imbuhan berupa awalan dan akhiran menjadi pengelolaan yang mempunyai arti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan

⁶John M.Echols & Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976), h. 563.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1102.

kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁸

- d. Dana, Uang tunai atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu.⁹
- e. Zakat, kata dasarnya adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahik*).¹⁰
- f. Mengentaskan berasal dari kata entas: mengubah lebih baik (tentang kehidupan), misalnya: Mengentaskan kemiskinan.¹¹
- g. Kemiskinan: hal miskin; yang digunakan dalam hukum zakat untuk seseorang yang sudah tanpa pengharapan atau cacat oleh penyakit, usia tua atau peperangan dan yang tidak mampu untuk bekerja atau tidak dapat memelihara dirinya dan keluarganya.¹²

Pengertian judul di atas yang terdiri dari beberapa kata, yaitu “Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan)”,

⁸Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Cet. 1; Surabaya: Kartika, 1997), h. 305.

⁹Ralona M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jl. Gunung Sahari III/7: Gorga Media, 2006), h. 82.

¹⁰Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 192.

¹¹ Kamisa, *op. cit.*, h. 162.

¹²Muhammad Sholahuddin, *op. cit.*, h. 98.

maksudnya adalah penyelidikan terhadap pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan atau mengubah kehidupan orang-orang miskin menjadi lebih baik khususnya di Kota Makassar.

C. Kajian Pustaka

Pembahasan skripsi ini mengemukakan tentang **“Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar. (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan)”**. Setelah menelusuri berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis di antaranya buku yang berjudul:

1. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, oleh Sudirman. Di dalam buku ini membahas tentang Urgensi Zakat dalam Ajaran Islam, Konsep Dasar dan Sejarah Zakat, definisi zakat, dasar hukum zakat, dan masih banyak lagi yang dibahas dalam buku ini.
2. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, oleh Fakhruddin. Buku ini membahas tentang *fiqh* zakat sekaligus manajemennya di Indonesia, seperti halnya zakat dalam lintasan sejarah, Makna zakat dalam harta seorang Muslim, Sejarah pengelolaan zakat, Manajemen zakat di Indonesia, dan masih banyak lagi yang dibahas dalam buku ini.
3. *Zakat & Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, oleh Muhammad Ridwan Mas’ud. Di dalam buku ini telah dibahas tentang Zakat dalam perspektif agama dan ekonomi Islam, Zakat dan penanggulangan ekonomi umat, dan masih banyak lagi yang dibahas dalam buku ini.

4. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* oleh Fahrur Mu'is. Yang dibahas dalam buku ini Harta yang wajib dizakati, yaitu definisi, syarat, nisab, kadar zakat, dalil, penjelasan, waktu pengeluaran zakat, cara menghitung zakat, dan masih banyak lagi yang dibahas dalam buku ini.

5. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)* oleh Abdurrahman Qadir. Dalam buku ini membahas tentang Konsep Harta dan Pemilikan Dalam Islam, Kewajiban dan Pelaksanaan Zakat, dan masih banyak lagi yang dibahas di dalamnya.

Dan masih banyak lagi judul buku yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang erat sekali hubungannya dengan judul yang dibahas, dan menurut penulis masalah dana zakat merupakan masalah sensitif yang perlu mendapat sorotan sekarang di mana pelaksanaan pemungutan zakat dapat dikelola secara efisien yaitu di lakukan sebaik-baiknya.

Masalah pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan, belum ada yang membahas masalah ini, jadi penulis merasa perlu untuk membahasnya dan tertarik untuk menjadikannya sebagai karya ilmiah, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap kelompok orang yang melakukan aktivitas, termasuk aktivitas meneliti tentu ada target dan tujuan yang berhak dicapai. Begitu pula penulis dalam hal ini mengadakan penelitian, oleh karena itu ada tujuan yang hendak dicapai.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Kota Makassar.
- b. Untuk memberikan gambaran yang benar tentang pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar kepada pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang zakat.
- c. Sebagai bahan acuan dan motivasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu zakat.

E. Garis Besar Isi

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis besar isi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang yang akan dipecahkan untuk mencari solusi dalam penelitian ini, dari latar belakang permasalahan tersebut ditarik suatu rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta garis besar isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, bab ini khusus membahas secara umum tentang zakat.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini berisi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Badan Amil Zakat (BAZ) dan Hasil Pembahasan.

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Badan Amil Zakat (BAZ), faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kota Makassar, pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan, dan kendala atau hambatan dalam pengelolaan zakat.

Bab V Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” dalam bahasa Arab. Kata “*az-zakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuw*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik).

Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta'ala wajib untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Rumusan ini melibatkan beberapa hal yang terkait dengan zakat. Zakat terkait dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau *nishab*, jenis harta yang dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proporsi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta.¹

Dalam terminologi *fiqih*, secara umum, zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut, Ulama kontemporer Mesir, mendefinisikan

¹Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat “Hidup Berkah Rezeki Melimpah”* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 8.

zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah agar orang kaya menolong orang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah sebagai ibadah *maliyah* yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa bila disebut *zakat* maka yang dimaksud ialah sedekah wajib, jika disebut sedekah atau infak maka yang dimaksud adalah sedekah sunnat, dan jika disebut hak maka yang dimaksud ialah hak milik.

Ibn Hazm mengatakan bahwa harta benda sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama *ushul fiqih* adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang kongkret, dengan demikian tidak termasuk ke dalamnya pemilikan manfaat. Menurut Syaltut, pengertian harta benda yang wajib dikeluarkan *zakat-nya* ialah semua yang dimiliki manusia berupa uang, binatang ternak, maupun tanaman-tanaman yang menunjang kehidupan manusia untuk menunjang eksistensinya dan menunaikan segala eksistensinya dan menunaikan segala kemaslahatan dirinya.²

² Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 326.

Sejalan dengan pendapat di atas Allah SWT, menegaskan dalam surah:³

a. Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

a. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁴

2. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah atau zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri dan zakat mal yang biasa dibayar kapan saja asalkan sudah terpenuhi segala ketentuannya.

³Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Cet. Mei; Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.18.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jamnatul 'Ali Art, 2005), h. 204.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah (*baka fitur*) yaitu zakat badan atau jiwa yang dikeluarkan berkaitan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib atas tiap-tiap yang bernyawa, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, merdeka, atau budak yang mempunyai kelebihan makanan dan keperluan sehari semalam bagi dirinya, keluarganya pada Hari Raya Fitri.⁵

Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang Muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya. Membersihkan jiwa manusia dan kesalahan yang diperbuat selama bulan Ramadhan.

Selain itu, zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan untuk seluruh umat Islam yang telah menahan nafsunya dengan berpuasa selama satu bulan penuh. Dan hari kemenangan sudah sewajarnya dirayakan dengan kegembiraan dan keceriaan. Tidak ada satu orang Muslim pun yang sedih menyambutnya disebabkan oleh tidak adanya makanan untuk keluarganya karena semua Muslim yang tidak mampu telah mendapatkan bantuan atau haknya dari zakat fitrah.⁶

Menurut beberapa ulama ada beberapa perbedaan pilihan waktu dalam membayarkan zakat fitrah.

⁵Malahyati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Cet; 1. Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), h. 134.

⁶Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *op. cit.*, h. 65.

1. Sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dalam hal ini, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, lebih tepatnya waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu saat terbit fajar di hari raya Idul Fitri.
2. Boleh mulai dua hari sebelum hari raya. Ini merupakan hasil kesepakatan jumhur ulama.

Mulai dari awal Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sementara itu, untuk syarat orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah, berikut keterangan lengkapnya:

- a) Islam, ini sudah pasti dan merupakan syarat mutlak. Allah hanya mewajibkan kepada Muslim saja.
- b) Masih hidup atau lahir sebelum shalat Id.
- c) Memiliki satu *sha'* makanan pokok dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk malam hari raya sampai siang. Sedangkan yang benar-benar tidak mempunyai kecukupan harta untuk malam sampai siang hari raya tidak wajib membayar zakat, justru akan mendapatkan zakat dari orang lain.⁷

b. Zakat Mal

Zakat Mal, atau zakat harta benda, telah di fardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW, berhijrah ke Madinah. Tidak heran urusan ini amat cepat

⁷*Ibid.*, h. 69.

diperhatikan Islam, karena urusan tolong-menolong, urusan yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.⁸

1. Zakat Pertanian dan Perkebunan.

Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya yang menyenangkan serta tahan disimpan lama wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai *nishab*. *Nishab*-Nya adalah 5 wasaq.

1 wasaq = 60 *sha*’

5 wasaq = 300 *sha*’

1 *sha*’ = 3,1 liter

Jadi, $300 \times 3,1 = 930$ liter (*nishab* zakat pertanian)

Dengan demikian, *nishab* zakat pertanian berupa biji makanan yang mengenyangkan adalah 930 liter. Demikian pula dengan hasil perkebunan, seperti buah-buahan. *Nishab*-nya adalah 930.

Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila sistem pengairan pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya adalah 10%. Namun, jika sistem pengairannya menggunakan mesin diesel maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 5%.⁹

1. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:

⁸M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustak Rezki Putra, 2009), h. 8.

⁹M. Syafi’ie El-Bantanie, *Zakat, Infak & Sedekah* (Cet. I; Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 22.

Tabel 1.
Nishab Zakat Unta

Nishab	Zakatnya	
	Bilangan dan Besarnya Zakat	Umur
5 – 9	1 ekor kambing atau 1 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
10 – 14	2 ekor kambing atau 2 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
15 – 19	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
20 – 24	4 ekor kambing atau 4 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
25 – 35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 – 45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46 – 60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 – 75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76 – 90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91 – 120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 ke atas	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Tabel II.**Nishab Zakat Sapi atau Kerbau¹⁰**

Nishab	Zakatnya	
	Bilangan dan Besarnya Zakat	Umur
30 – 39	1 ekor anak sapi atau	1 tahun lebih
	1 ekor kerbau	1 tahun lebih
40 – 59	1 ekor anak sapi atau	2 tahun lebih
	1 ekor kerbau	2 tahun lebih
60 – 69	1 ekor anak sapi atau	1 tahun lebih
	1 ekor kerbau	1 tahun lebih
70 Ke atas	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	1 tahun lebih
	dan 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih

Tabel III.**Nishab Zakat Kambing**

Nishab	Zakatnya	
	Bilangan dan Besarnya Zakat	Umur
40 – 120	1 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	1 ekor domba betina	1 tahun lebih
121 – 200	2 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	2 ekor domba betina	1 tahun lebih
201 – 300	3 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	3 ekor domba betina	1 tahun lebih

¹⁰*Ibid.*, h. 25.

301 Ke atas	4 ekor kambing betina atau	2 tahun lebih
	4 ekor domba betina	1 tahun lebih

2. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *Nishab*. *Nishab* emas adalah 20 dinar atau setara dengan 93,6 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

Sedangkan *nishab* perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram perak. 1 dirham setara dengan 3,12 gram perak, maka $200 \times 3,12 = 624$ gram perak. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

3. Zakat Harta Perniagaan

Tahun perniagaan di hitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu, apabila cukup satu *nishab*, maka wajib dibayarkan zakatnya. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya suatu nisab. *Nishab* harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harta pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebanyak zakat atau perak, yaitu 2,5%.¹¹

4. Zakat Rikaz dan Tambang

a. Rikaz

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang terpendam sejak jahiliyah, dan ditemukan di suatu bidang tanah yang pernah dimiliki oleh seseorang pada masa

¹¹H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet. 27; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 198.

Islam. Apabila rikaz atau barang yang ditemukan itu berupa emas atau perak, maka si penemu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak khumus (seperlima)-nya. Pada harta rikaz ini tidak di perlukan berlakunya *haul*.

b. Tambang

Adapun tentang hasil tambang, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali apabila berupa emas dan perak. Jumlah zakatnya, menurut pendapat yang lebih shahih ialah 2,5% (seperempatpuluh) dari hasilnya, setelah diolah dan dibersihkan serta mencapai *nishab*. Juga terdapat perbedaan pendapat tentang apakah diperlukan berlakunya masa setahun (*haul*) atau tidak.¹²

Menurut pendapat lainnya (tentang hasil tambang berupa emas dan perak) zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak khumusnya. Jadi sama seperti dalam zakat rikaz. Berdasarkan pendapat ini pula, tidak dipersyaratkan berlakunya *haul* atau dipenuhinya *nishab*.

5. Zakat Piutang

Apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan jumlah hartanya itu mencapai *nishab* atau lebih dan telah sampai *haul*, harta yang diutangkan itu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat orang yang berutang adalah orang yang mampu.

Adapun mengenai cara pembayarannya, para ulama berpendapat. Perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut.

¹²Al-Gazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Cet. V; Bandung: Penerbit Karisma, 1994), h. 56.

- a. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun karena harta tersebut disamakan dengan barang titipan (*wadi'ah*). Ini adalah pendapat Imam Syafi'I.
- b. Harta piutang itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan (dibayarkan) kepada yang berpiutang untuk seluruh tahun sekaligus. Ini adalah pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal.
- c. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dikembalikan, dan cukup hanya satu tahun saja, yaitu tahun saat dikembalikannya, ini adalah pendapat Imam Malik.

6. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) mencapai *nishab*, seperti profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, seniman, dan perancang busana atau desainer.

Adapun *nishab*-nya, diqiyaskan kepada *nishab* emas, yaitu senilai 93.6 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5%.¹³

3. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam surah At-Taubah: 60. Mereka itu terdiri atas delapan golongan.

¹³M. Syafe'I El-Bantanie, *op. cit.*, h. 32.

Firman Allah SWT.:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁴

Dengan ayat Al-Qur'an di atas dapatlah dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan kehidupannya untuk sehari-hari.
- b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.
- c. *Amil*, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Seemarang: Toha Putra, 1998), h. 197.

- d. *Mua'allaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.
- e. Hamba sahaya, yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- f. *Gharim*, yaitu orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
- g. *Sabilillah*, yaitu orang yang berjuang suka rela untuk menegakkan agama Allah.¹⁵
- h. *Ibnu Sabil* adalah bahasa lain dari musafir. Musafir disebut demikian, karena ia selalu berada di jalan Allah SWT. Adapun syarat pemberian zakat kepada ibnu sabil antara lain, yaitu ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke negerinya dan perjalanannya bukan dalam rangka maksiat, misalnya haji, dagang, dan lain sebagainya. Jika memang demikian kondisinya ia berhak diberi bagian zakat.¹⁶

4. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

¹⁵ Moh. Saifulloh Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2007), h. 283.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 418.

2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu stabil, dan para mustahik lainnya.
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dengan dari orang-orang miskin.

b. Hikmah Zakat

1. Menyucikan manusia dari sikap keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
2. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
3. Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.¹⁷
4. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang kaya saja.

B. KEMISKINAN

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan suatu persoalan dan tampaknya akan terus menjadi persoalan yang aktual dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia.

¹⁷Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, (Cet. I; Solo: Tinta Medina, 2011), h. 31.

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Jika seorang pedagang misalnya memiliki jumlah modal berjumlah senisab atau lebih, tetapi keuntungan yang dihasilkannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya., ia tetap dianggap miskin. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakat hartanya karena telah mencapai nisab, tetapi ia juga boleh menerima zakat sebagai orang miskin.¹⁸

Al-Thabathaba'i, menafsirkan kata fakir mempunyai arti lebih umum bagi orang yang tidak memiliki harta, termasuk di dalamnya miskin. Kemiskinan adalah keadaan penghidupan di mana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Senada definisi di atas, Zakiah Daradjat mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut kemiskinan adalah orang yang tidak cukup, penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Adapun menurut *Taqyuddin*, kemiskinan menurut bahasa maknanya adalah *ihityaj* (membutuhkan). Bisa dinyatakan dengan, *Faqara Wa Iftaqara* kata dari *istaghna* (tidak membutuhkan). Sedangkan kemiskinan menurut pengertian syara' maknanya adalah orang yang membutuhkan plus lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa. Mujahid mengatakan: kemiskinan adalah orang yang tidak bisa dimintai apa-apa.¹⁹

¹⁸Lahmuiddin Nasution, *Fiqh 1* (Logos, Departemen Agama, 1995), h. 176.

¹⁹Muhammad Ridwan Ma'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 70.

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Secara teoritis kemiskinan sering dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memikirkan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil).²⁰

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan “relatif” atau “ketimpangan relatif” menekankan segi lain dari keadaan kelompok miskin, yaitu ketidaksamaan kesempatan dan kemampuan di antara berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa/pelayanan dalam menikmati kehidupan yang makmur. Di dalam suatu masyarakat dikatakan terdapat kemiskinan relatif apabila ada lapisan atau kelompok tertentu yang tidak

²⁰Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011* (Makassar: Badan Pusat Statistik, 2011), h. 7.

mendapatkan dan menikmati apa yang dapat diperoleh dan dapat dinikmati oleh lapisan atau kelompok lain.²¹

3. Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Perkembangan zakat di Indonesia terus mengalami kemajuan setelah lahirnya Undang-Undang Zakat No. 38 tahun 1999, sehingga zakat sudah di urus oleh badan maupun lembaga amil zakat yang amanah dan profesional, dengan menggunakan sistem modern. Munculnya lembaga-lembaga zakat profesional di Indonesia saat ini, telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan dan meminimalisir kemiskinan dan penderitaan yang banyak diderita masyarakat.

Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat selain dari faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh sebagian kaum miskin itu sendiri, jika disebabkan karena tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang kaya, yaitu zakat yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisifasi secara dini agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orang kaya yang menahan zakat tersebut, maka modal dan kekayaan yang akan bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan.

²¹P. Soedarno, *Ilmu Sosial Dasar Bukun Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 196.

Berdasarkan prinsip tersebut umat Islam diharapkan saling mendukung sehingga usaha-usaha di bidang Ekonomi yang dijalankan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang keras dan bebas.

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi:

1. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari swadaya masyarakat maupun pemerintahan.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan *shadaqah tathawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Persoalan pokok dalam mengentaskan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatangi jurang antara kelompok kaya dan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Faktor terpenting dalam pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengamalannya dengan sistem pengelolaan yang profesional.²²

C. PENGELOLAAN ZAKAT

1. Amil (Pengelola) Zakat

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolah Zakat Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelolah Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

Amil zakat adalah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara, dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para *mustahiknya*. Allah menyediakan bagian bagi mereka dari harta zakat.

Perhatian Al-Quran terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok *mustahik* (yang berhak menerima zakat) yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari

²² Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 223.

pengumpul, penyimpanan, penulis, penghitung dan sebagainya. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan dari padanya gaji para pelaksananya.

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para *mustahik* zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
2. *Mukallaf*, yaitu seorang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
3. Jujur, karena dia diamanati harta kaum muslimin. Petugas zakat tidak bisa dari orang fasik tidak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat dzalim kepada pemilik harta, atau ia akan sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin.
4. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. Apabila pekerjaannya menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas tersebut.

Adapun kriteria yang dituntut dari Amil Zakat yaitu:

- a. Profesional: harus menguasai tata cara pengelolaan zakat dengan benar, baik dari syar'i maupun manajemen dan dijalani dengan waktu penuh sebagai satu profesi.
- b. Amanah: harus jujur dalam mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar dipercaya oleh masyarakat, terutama para *muzakki*.
- c. Transparan: bersifat terbuka dalam pengelolaan, sehingga publik dapat mengetahui hasil pengumpulan dan penyalurannya melalui media.

2. Pemerintah Sebagai Pengelola Dana Zakat

BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan. Sebagaimana hal tersebut seharusnya Badan Amil Zakat (BAZ) dalam perjalanannya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari pembiayaan operasional, maupun teknis pengelolaan dana zakat itu sendiri

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari *mustahik* (penerima zakat) termasuk orang miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Ibadah

zakat itu tidak sekedar amal karitatif (kedermawanan), akan tetapi ia juga sebagai kewajiban.²³

Oleh karena itu pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa, dan haji yang telah dibakukan dengan *nash* yang penerapannya hanya dipertanggung jawabkan

Kepada Allah SWT, sedangkan zakat itu dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, juga dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, karena itu pengamalannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah lain. Untuk itu perlu diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaannya agar hak-hak para *asnaf* delapan golongan, terutama fakir miskin dalam harta orang kaya dapat diterimanya dengan pasti, demi tegaknya keadilan. Untuk itu dapat terlaksananya ibadah zakat.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri dari para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung dengan wajib zakat (*muzakki*).
3. Untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam pemungutan harta zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat.

²³Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Cet. 1; Makassar: Aluddin Press, 2011), h. 88.

Sebaliknya jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap wajib zakat, maka nasib dan hak orang fakir, dan *mustahik* lainnya pada orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.²⁴

3. Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat

a. Perencanaan Strategis Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, maka dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil yang ingin dicapai.
2. Yang akan dilakukan.
3. Waktu dan skala prioritas.
4. Dana (kapital)²⁵

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan.

²⁴*Ibid.*, h. 89.

²⁵Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Cet. 1; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 268.

b. Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga mempunyai perencanaan tujuan kelembagaan. Secara praktis tujuan merupakan suatu yang ingin di capai. Dalam Islam, tujuan apa pun yang ingin dicapai harus tetap melandaskan prinsip syariat, lebih-lebih dengan lembaga atau badan zakat. Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Sejak mengggagas konsep perencanaan, rekrutmen, pengorganisasian, pelaksanaan, Monitoring, dan evaluasi, seluruhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat.

Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Memudahkan *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
2. Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada *mustahik* yang berhak menerimanya.
3. Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri.
4. Terwujudnya kesejahteraan sosial.²⁶

²⁶*Ibid.*, h. 277.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Setiap penelitian selalu dihadapkan dengan masalah yang menuntut jawaban yang paling akurat. Oleh karena itu, diperlukan metode pemecahan masalah yang mencakup:

A. Jenis Penelitian

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan suatu bentuk penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menangkap gejala melalui pengumpulan data dari subyek yang diteliti sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti sendiri, yaitu peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Sugiyono dalam bukunya menyebutkan bahwa metode kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan bersamaan dengan catatan bahwa metode penelitian tidak dapat digabungkan karena paradigmanya berbeda. Tetapi dalam penelitian kualitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data (bukan metodenya). Dalam penelitian kualitatif misalnya, teknik pengumpulan data yang utama misalnya

menggunakan daftar wawancara tertulis kepada informan, data yang diperoleh adalah data kualitatif. Selanjutnya untuk memperkuat dan mengecek validitas data hasil wawancara tersebut, maka dapat dilengkapi dengan observasi atau wawancara kepada informan yang telah memberikan jawaban pertanyaan yang diajukan penulis, atau orang lain yang memahami terhadap masalah yang diteliti. Sehingga dengan adanya data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada pihak badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang memberikan informasi sehingga penulis dapat menyusun suatu proporsi.

B. Objek dan Tempat Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah *mustahik* dan kepala sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat penelitian dilaksanakan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jln. Masjid Raya No. 55 Makassar.

C. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Syari'at yaitu dalam membahas skripsi ini penulis mempergunakan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw sebagai rujukan utama.
2. Pendekatan Manajemen Zakat, yaitu meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

3. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan jalan melihat gejala-gejala sosial yang kemungkinan terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya aksi dalam interaksi antara anggota masyarakat sosial.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:¹

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan wawancara langsung mengenai pengelolaan dana zakat dan merupakan data yang diperoleh dari gambaran umum tentang pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang di dapat dari

- a. Perpustakaan.
- b. Literatur Zakat baik dari buku, makalah, surat kabar, jurnal maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.

¹A. Qadir Gassing HT dan Wahyuddin Halim, *PedomenPenulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis*, (Cet. II; Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 12.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh Informasi dan data yang terkait dengan pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:²

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer ini diperoleh melalui pengumpulan-pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu dengan cara wawancara terarah (*directive interview*) kepada pihak Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik memperoleh data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mendapatkan data-data informasi yang terkait dengan pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu sebagai pembanding dan bahan referensi, penulis juga melakukan studi pustaka guna mendapatkan, mempelajari, dan menelaah literatur-literatur, artikel-artikel, internet dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

²*Ibid.*, h. 12.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat dokumen yang ada. Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan metode isi (*contentanalysis*). Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan operasional Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan .

F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisa dekriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisa non statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisa data yang bertolak dari problem atau pertanyaan maupun tema spesifik yang dijadikan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul dari hasil penelitian, dan kepustakaan yang ada, kemudian data tersebut dikelola dengan metode:

- a. Metode Induktif, yaitu metode menganalisis data dalam pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu metode menganalisis data yang bersifat umum kemudian diuraikan agar diperoleh pengertian dan kesimpulan yang khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya/Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi

Sulawesi Selatan

Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat Islam memiliki potensi zakat (mal, fitrah, pertanian, dan lain-lain) yang sangat besar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan karena dikelola secara individual. Kalaupun sudah ada badan pengelolanya, namun belum maksimal dan transparan. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, sehingga masyarakat masih mendistribusikan zakat mereka sendiri.

Melihat kondisi demikian, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan secara operasional dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pemerintah daerah Sulawesi Selatan menindaklanjuti keputusan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 420/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan yang dikukuhkan pada tanggal 04 September 2001. Dan pada tanggal 29 Januari 2007 bertepatan dengan 10 Muharam, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan mencanangkan Hari Sadar Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat untuk melayani *musakki*, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan pemerintah di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Wilayah Departemen Agama Provinsi atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbadan hukum.
2. Memiliki data *musakki* dan *mustahik*.
3. Memiliki program kerja.
4. Memiliki pembukuan.
5. Melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.

Pengukuhan dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Proses pengukuhan dapat pula dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan mulai menjalankan fungsi dan tugasnya pada tahun 2001. Sekretariat Badan Amil zakat (BAZ) Provinsi

Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Mesjid Raya No. 55 Makassar, terdiri atas satu bangunan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kantor, sekolah, dan rumah bersalin.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan sejak terbentuknya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan , yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum *dhu'afa*.
- b. Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan
 - a) Mengembangkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan lain-lain. secara profesional atas dasar STAF (*Shiddiq, Tabligq, Amanah, dan Fathanah*).
 - b) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat.
 - c) Mengubah kondisi *mustahik* menjadi *muzakki*.

3. Program Yang Terealisasi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan

Sejak terbentuknya, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada kaum *dhu'afa*. Program yang telah terealisasi dengan baik antara lain:

1. Sekolah Dasar Anak Indonesia (SDAI) BAZ Provinsi Sulawesi Selatan untuk anak yang tidak mampu dengan jumlah murid 160 orang.

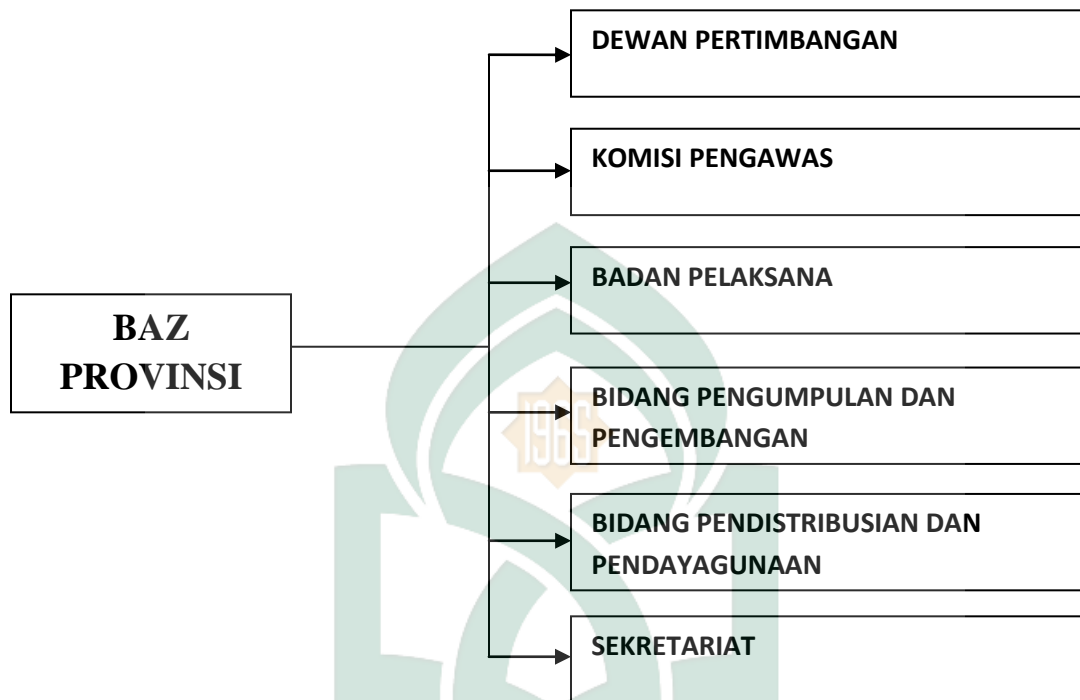
2. Pendistribusian Modal Usaha Produktif untuk kaum *dhu'afa*.
3. Kursus menjahit untuk wali murid SDAI BAZ Provinsi Sulawesi Selatan 2 angkatan.
4. Bantuan pembangunan/rehab masjid.
5. Mendirikan Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC) Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dompot *Dhu'afa* Sulawesi Selatan yang telah diresmikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret 2010.
6. Tahun 2010-2011, buka puasa bersama 2000 *dhu'afa*.
7. Bantuan sembako untuk korban kebakaran.

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan

Struktur Organisasi perusahaan merupakan manajemen dalam memperlancar mekanisme suatu perusahaan. Secara umum gambaran struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan di sajikan pada bagan berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI SULAWESI SELATAN



SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI
SULAWESI SELATAN PERIODE 2008-2011

DEWAN PERTIMBANGAN :

Ketua	: Dr. H. Syahrul Yasin Limpo ,SH, M.Si, MH
Wakil ketua	: Ir. H. Agus Arifin Nu'mang,M.Si
Sekretaris	: H. A. Muallim,SH, M.Si
Anggota	: 1. K.H. Sanusi Baco,Lc
	2. Drs. M. Tahir Hasan
	3. Prof. Dr. H. Jalaluddin Rahman
	4. Drs. H. Bahri Mappiasse,M.Ag
	5. Prof. Dr. H. M. Saleh Putuhena
	6. Prof. Dr. H. Muin Salim
	7. Drs. KH. Nasaruddin Razak

KOMISI PENGAWAS :

Ketua : Prof. Dr. H. HALIDE
 Sekretaris : Drs. H. Ilham A.Gazaling,M.Si
 Anggota : 1. Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA
 2. Prof. Dr. H. Abd. Muis Kabri
 3. Drs. H. Ahmad Sewang
 4. Prof. Dr. H. Rahim Yunus, MA
 5. Prof. Bahaking Rama
 6. Prof. Dr. Achmad Abubakar

BADAN PELAKSANA :

Ketua : Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
 Wakil Ketua I : 1. Prof. H. Qasim Mathar
 Wakil Ketua II : 2. Drs. H. M. Yunus Shamad ,Lc, M.Ag
 Sekretaris : Drs. H. Muh. Abduh Halid, MH
 Wkl. Sekretaris I : 1. Drs. H. Basir, MH
 Wkl. Sekretaris II : 2. H. Muhammad Nuhrahim, SH
 Bendahara : Drs. H. Moh. Yushar Huduri, MSi
 Wakil Bendahara : Ikbil Ismail, S.Ag

BIDANG PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN :

Ketua : Dr. H. Kaswad Sartono, S.Ag, M.Ag
 Sekretaris : H. Suherman , SE, MM
 Anggota : 1. Drs. H. Mudarak Dahlan,. S.Ag, M.Ag
 2. Drs. H. Muh. Mansyur Kadir, M.Ag
 3. H. Muh. Nasir, SH,MH
 4. Muhammad Asri
 5. H. A. Sriyanti, SH
 6. Imran, AMd

BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN :

Ketua : Prof. Dr. Irfan Idris, M.Ag
 Sekretaris : H. Asmirullah, BSC
 Anggota : 1. Drs. H. Rahim Mas.P. Sanjata, M.Ag
 2. Agung Prawiranegara, S.Sos, M.Si
 3. Drs. M. Yunus Muin, M.Ag
 4. Agung Agriawan
 5. Kamaruddin, S.Ag
 6. Nadrah Qurais

SEKRETARIAT :

Kepala Sekretariat : Rasmuddin, S.Ag
 Anggota : 1. Usman Zakaria
 2. Bakri, S. Ag
 3. Rahmawaty, SE
 4. Rahman, S.Ag
 5. Gasumi Arwin Gani, AMd

6. Hasmawati, SE¹

5. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun tugas dari pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Sulawesi Selatan antara lain;

1. Tugas Dewan Pertimbangan antara lain:

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Mengarahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa Syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Memberikan pertimbangan, sarana dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- f. Menunjuk akuntan publik

2. Tugas Komisi Pengawas

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

¹Sumber Data: *Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 4 Agustus 2012.*

- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
3. Tugas Badan Pelaksana
- a. Membuat rencana kerja.
 - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan.
 - c. Menyusun laporan.
 - d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
 - e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas amanah Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam maupun keluar.
4. Tugas bidang pengumpulan dan pengembangan
- a. Menyusun rencana pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
 - b. Mengatur dan melaksanakan program pengumpulan dana Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. Melaksanakan segala usaha penelitian dan pengembangan sumber dana Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, objek pendayagunaan, pengembangan organisasi, administrasi dan tata usaha.
 - d. Mempersiapkan peraturan-peraturan, formulir, sistem kerja dan penyuluhan.

- e. Menyerahkan hasil pengumpulan dana ke rekening bank Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan dan membukukan kepada bendahara.
 - f. Bidang pengumpulan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada pengurus harian.
 - g. Bidang pengembangan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kerja kepada ketua pengurus harian.
5. Tugas bidang pendayagunaan dan pendistribusian
- a. Melaksanakan program pendayagunaan dan pendistribusian dana Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pengarahan pelaksanaan proyek-proyek pendayagunaan, baik yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya maupun organisasi Islam.
 - c. Menetapkan proyek pendayagunaan oleh organisasi Islam.
 - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua pengurus harian.
6. Tugas Sekretariat
- a. Melaksanakan kegiatan tatausahaan.
 - b. Menyediakan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, serta mempersiapkan bahan laporannya.

- c. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sehari-hari.
- d. Membantu kegiatan ketua harian dalam mengkoordinasikan urusan-urusan serta bagian-bagian.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan Di Kota Makassar

Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih akan tetap merupakan keprihatinan banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan diperlukan sejumlah instrumen statistik yang dapat menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin. Instrumen itu yang utama antara lain jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk rata-rata pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, dan persentasi penduduk miskin dan total populasi.

Adapun jumlah penduduk miskin di Kota Makassar Tahun 2010-2011, yaitu sebanyak 78,7%, persentasi penduduk miskin sebanyak 5,86% dan garis kemiskinan (Rp./Kap/bulan) di Kota Makassar sebanyak 233.815. Sedangkan index kedalaman kemiskinan (P1) sebanyak 1,03% dan index keparahan kemiskinan sebanyak 0,32%.²

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau kelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi

²Data & Informasi Kemiskinan Kab/Kota 2010 (Jakarta: BPS, 2011), h. 21.

dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau kelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Jika diperhatikan tipologi atau kondisi orang-orang miskin (termasuk fakir) pada garis besarnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Mereka yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor seperti usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke Panti Sosial (panti jompo) atas biaya dana zakat secara konsumtif.
- b. Mereka yang tergolong masih sehat fisik jasmani, tetapi memiliki keterampilan apa pun atau tergolong bodoh. Pengentasan kemiskinan untuk golongan seperti ini diberikan pelatihan dan pendidikan khusus kewiraswastaan atau pendidikan keterampilan lainnya yang mungkin dilakukannya, atau dipekerjakan di unit-unit usaha ekonomi yang dikelola oleh BAZIZ setempat sehingga mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

- c. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih profesional untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka langkah pengentasannya adalah memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat dalam bentuk *qhardul hasan* (pinjaman tanpa bunga) sampai mereka mampu mengembalikan pinjaman tersebut setelah usahanya berjalan dengan baik.³

Pada bagian ini disajikan pertanyaan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yaitu Bapak Rasmuddin, S.Ag, Bapak Usman Zakaria dan Bapak Bakri, S. Ag Sebagai pengurus sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kota Makassar.

Faktor-faktor terjadinya kemiskinan di Kota Makassar yaitu:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah.
- b. Cara berfikir yang masih tradisional dan konservatif akan hal-hal yang baru.
- c. Keadaan alam yang kurang mendukung.
- d. Adanya bencana alam.
- e. Tidak seimbang nya orang yang datang di Kota Makassar dengan lowongan pekerjaan yang ada.
- f. Para urbanisasi tersebut tidak memiliki pekerjaan yang jelas, oleh sebab itu mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

³Abdurrachman Qadir, *op. cit.*, h. 224.

- g. Para urbanisasi cenderung tinggal pada pemukiman kumuh, dan tampak jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mampu.⁴

C. Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar

Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi, wilayahnya merupakan wilayah pesisir. Kota Makassar berbatasan dengan dua Kabupaten, yaitu sebelah utara dan timur adalah Kabupaten Maros, kemudian sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar.⁵

Penduduk Kota Makassar tahun 2010-2011 tercatat sebanyak 1.337.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar sekitar 97,55% yang berarti setiap 100 penduduk terdapat 98 penduduk laki-laki.⁶

Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan terus membaik dari tahun ke tahun dan memperoleh pengakuan dan penghargaan sebagian pihak. Untuk melihat bagaimana pengumpulan, pendayagunaan dan usaha transparansi yang dipraktekkan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, berikut dipaparkan mekanisme pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ).

Mekanisme ini berawal dari penetapan target dan penyusunan program kerja yang akan dilakukan tahun depan, kemudian pelaksanaan program kerja dengan

⁴Rasmuddin, Usman Zakaria dan Bakri (Anggota Sekretariat), Wawancara, Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan (13.20), 4 Agustus 2012.

⁵Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Statistik Daerah Kota Makassar* (Makassar: Badan Pusat Statistik, 2010), h. 1.

⁶ Makassar Dalam Angka, 2011, h. 21

pembinaan dan pengawasan, dan pelaksanaan evaluasi yang dihasilkan menjadi bahan untuk penetapan target dan penyusunan program kerja di tahun berikutnya.

Secara rinci urutan kegiatan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Setiap awal tahun Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target pengumpulan zakat. Berdasarkan target tersebut, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.
2. Pada tahap berikutnya, rencana dan program kerja ini disampaikan kepada badan pembina untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh restu Badan Pembina, ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan dan menjelaskan rencana dan program kerja kepada seluruh aparat di jajaran BAZ, untuk pelaksanaan lebih lanjut.
3. Hasil pengumpulan zakat tersebut disetorkan dan dilaporkan secara berkala kepada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, memonitor dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpulan zakat di bank yang telah ditunjuk dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Gubernur melalui Badan Pembina.

Mekanisme penyaluran dan pendayagunaan dana zakat selanjutnya dikelola dengan mekanisme kerja sebagai berikut: dalam rangka penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi

Selatan menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para *mustahik*.

Merumuskan strategi kebijaksanaan penyaluran dan pendayagunaan dan zakat untuk tahun bersangkutan, guna memperoleh penetapan lebih lanjut. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, ketua BAZ Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya di setiap bulan Ramadhan atau di sesuaikan dengan program kerja BAZ Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul dari para *muzakki* dan disalurkan dalam bentuk:

1. Konsumtif

Dalam hal terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Konsumtif Tradisional.

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif.

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, kesehatan, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat-alat pertanian seperti cangkul, gerobak jualan untuk pedagang kecil dsb.

2. Produktif

Dalam hal terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
- b. Produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

3. Kesehatan

Dalam kategori ini penyaluran yang diberikan maksudnya dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis berupa: pemeriksaan kehamilan, persalinan 24 jam, perawatan setelah melahirkan, imunisasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB).

4. Pendidikan

Dalam kategori ini penyaluran yang diberikan maksudnya dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.

Tabel 1.
DATA PEMBAYAR ZAKAT TAHUN 2010
PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA/ INSTANSI	JUMLAH	Ket
1	Biro perlengkapan	Rp. 3.750.000	
2	Dispenda	Rp. 122.400.000	
3	Sahru ramadan	Rp. 330.000	
4	dr.hasanuddin,P.Hd	Rp . 2.000.000	
5	Prof A. Razak Thaha	Rp. 3.650.000	
6	UPZ Bank Sul-Sel	Rp. 187.000.000	
7	Drs.H.A.Salipolo	Rp. 500.000	
8	Ir.Aan Farhan Lukman MBA	Rp. 250.000	
9	DR.H.Syahrul YL,SH,M.Si,MH	Rp. 20.000.000	
10	Budiamin	Rp. 3.000.000	
11	Zohrah	Rp. 900.000	
12	Ikbali Ismail	Rp. 250.000	
13	H.Mustari ,Soba,SH,M.Hi	Rp. 5.000.000	
14	Drs.H.Syafiuddin Makka	Rp. 500.000	
15	Indira Aisyah Wetenripada	Rp. 60.000.000	
16	Heryanto	Rp. 2.000.000	
17	dr.Alamsyah Ambo Ala Husain	Rp. 5.000.000	
18	Fia	Rp. 530.000	
19	UPZ Sekwan Korpri	Rp. 1.234.000	
20	Samsurya Jaya	Rp. 1.650.000	
21	Prof.Rahim Yunus	Rp. 1.000.000	
22	H.A Muallim,SH	Rp. 10.000.000	
23	Ir.M.Kasim Alwi	Rp. 400.000	

24	Dra.Hj.Tja Tjambolang M.Said,M.S	Rp. 1.000.000	
25	RSU Labuang Baji	Rp. 1.700.000	
26	UPZ B.Pengelolaan Keu.Daerah	Rp. 9.420.000	
27	HJ.Humaedah Tjoneng	Rp. 1.000.000	
28	H.Muhammad Ahmad	Rp. 1.000.000	
29	Abd.Karim Gili	Rp. 2.000.000	
30	A.Arifuddin Djuanna	Rp. 15.000.000	
31	Armandsyah Arifuddin	Rp. 10.000.000	
32	Abd.Adim Cigo	Rp. 300.000	
33	A.Zulkifli	Rp. 1.350.000	
34	Drs.Taslim Arifin	Rp. 5.000.000	
35	Muh.Rizaldi Nasri	Rp. 100.000	
36	Drs. H.A.Tjoneng Mallombasang	Rp. 13.500.000	
37	Dr.Andi Sastri	Rp. 1.687.500	
38	Drs. H.Jufri Rahman,M.Si	Rp. 1.500.000	
39	Badan Diklat Prov. SulSel	Rp. 231.500	
40	Peserta Diklat Ang. I SulSel	Rp. 3.000.000	
41	Usman Zakaria	Rp. 100.000	
42	Budi Raharjo	Rp. 1.000.000	
43	Efendi SH	Rp. 200.000	
44	Muh.Gazali	Rp. 250.000	
45	St.Nurul Amelia/Cv.Kurnia Anak Negri Ina	Rp. 500.000	
46	Hesti Amelia, W	Rp. 400.000	
47	M.Alham Djabar	Rp. 350.000	
48	Dr. Abduk Karim Salili	Rp. 17.300.000	
	Jumlah Total	Rp. 519.233.000	

Tabel II.
DATA PEMBAYAR ZAKAT TAHUN 2011
PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA/ INSTANSI	JUMLAH	Ket
1	Kemenag sulsel	Rp. 55.000.000	Npwz ok
2	Dispenda sulsel	Rp. 25.000.000	Npwz ok
3	Aan	Rp. 1.250.000	Npwz ok
4	Fia	Rp. 400.000	Npwz ok
5	Dr.Alamsyah Ambo Ala Husain,Sp An	Rp. 5.000.000	Npwz ok
6	Prof. rahim Yunus	Rp. 1.000.000	Npwz ok
7	Dr.Muslimin Ali,Sp.An	Rp. 5.000.000	Npwz ok
8	Budiamin	Rp. 1.500.000	Npwz ok
9	Sari nurlisa	Rp. 250.000	baru
10	Ihsan nasir/Nurisdah Idris	Rp. 1.800.000	Npwz ok
11	H. Mustari soba,SH,M.si	Rp. 5.000.000	Npwz ok
12	Dra.Hj. Hasidar,M.Si	Rp. 3.000.000	baru
13	Zohrah	Rp. 2.000.000	Npwz ok
14	Dr.H.A.Arifuddin Bin A.Juanna	Rp. 15.000.000	Npwz ok
15	Biro Keuangan Prov.SulSel	Rp. 25.484.375	Npwz ok
16	H.A.Yaksan Hamzah	Rp. 500.000	Npwz ok
17	Dr. Desi	Rp. 500.000	baru
18	Firnawaty Dahlan	Rp. 1.000.000	baru
19	Ilham	Rp. 200.000	baru
20	H.Rajulan Alleng	Rp. 200.000	baru
21	H.Muhammmad Ahmad	Rp. 500.000	Npwz ok

22	Abdul Karim Giti	Rp. 500.000	baru
23	Ariany Rofaidah	Rp. 1.000.000	Npwz ok
24	Rostiaty Natsir	Rp. 1.000.000	baru
25	Drs. Nuhun Ahmad,Ms	Rp. 1.000.000	Npwz ok
26	Biro Menspri Prov.SulSel	Rp. 1.798.000	Npwz ok
27	Hj.Noorhayati Wiryo Pranoto	Rp. 1.000.000	Npwz ok
28	Ismawati Annas	Rp. 500.000	Baru
29	DR.Syafruddin Gaus	Rp. 2.500.000	Npwz ok
30	DR.Hasanuddin Ishak	Rp. 500.000	Npwz ok
31	Drs.Taslim Arifin	Rp. 4.000.000	Npwz ok
32	Drs.H.A.Tjoneng Mallombasang	Rp. 5.000.000	Npwz ok
33	Hj.ST.Nursyam Saleh	Rp. 10.000.000	baru
34	Dispenda sulsel	Rp. 35.000.000	
35	H.Muh.Roem,SH,M.Si	Rp. 1.000.000	
36	Biro Aset Pengelolaan Prov. Sulsel	Rp. 3.955.000	
37	Dr.ABD Karim	Rp. 54.000.000	
	Jumlah Total	Rp. 272.337.375	

Table III.

**Distribusi Frekuensi Pendayagunaan Zakat
pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2011**

No	Pendayagunaan Zakat	Tahun			
		2010		2011	
		Rp	%	Rp	%
1	Konsumtif	155.769.900	30	81.701.212,5	30
2	Produktif	363.463.100	70	190.636.162,5	70
	Jumlah	519.233.000	100	272.337.375	100

Sumber Data: *Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 1 September 2012.*

Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2010 dari Rp. 519.233.000 atau 100% terdapat Rp. 155.769.900 atau 30% yang didayagunakan untuk zakat yang konsumtif dan Rp. Rp. 363.463.100 atau 70% yang didayagunakan untuk zakat yang produktif, pada tahun 2011 dari Rp. 272.337.375 atau 100% terdapat Rp. 81.701.212,5 atau 30% yang didayagunakan untuk zakat yang konsumtif dan Rp. 190.636.162,5 atau 71% yang didayagunakan untuk zakat produktif.

Tabel IV.

Distribusi Frekuensi Pendistribusian Pendayagunaan Zakat Konsumtif pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2011

No	Zakat Konsumtif	Tahun			
		2010		2011	
		Rp	%	Rp	%
1	Pendistribusian sembako	62.303.960	40	28.595.424,38	35
2	Renovasi SDAI	46.730.970	30	32.680.485	40
3	Operasional RBC	46.730.970	30	20.425.303,13	25
Jumlah		155.759.900	100	81.701.212,5	100

Sumber Data: *Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 1 September 2012.*

Tabel 3 Pada tahun 2010 menunjukkan dari Rp. 155.759.900 atau 100% jumlah zakat konsumtif yang dialokasikan untuk Pembagian sembako sebesar Rp. 62.303.960 atau 40%, Renovasi SDAI sebesar Rp. 46.730.970 atau 30%, dan Operasional RBC sebanyak Rp. 46.730.970 atau 30%, Pada tahun 2011 menunjukkan dari Rp. 81.701.212,5 atau 100% jumlah zakat konsumtif yang dialokasikan untuk

Pembagian sembako sebesar Rp. 28.595.424,38 atau 35%, Renovasi SDAI sebesar Rp. 32.680.485 atau 40%, dan Operasional RBC sebanyak Rp. 20.425.303,13 atau 25%.

Tabel V.

Distribusi Frekuensi Pendistribusian Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2011

No	Zakat Produktif	Tahun			
		2010		2011	
		Rp	%	Rp	%
1	Modal kerja	272.597.325	75	133.445.313,8	70
2	Kursus menjahit	90.865.775	25	57.190.848,75	30
Jumlah		363.463.100	100	190.636.162,5	100

Sumber Data: *Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 1 September 2012.*

Tabel 4 pada tahun 2010 menunjukkan dari Rp363.463.100 atau 100% jumlah zakat produktif yang dialokasikan untuk Modal kerja sebesar Rp. 272.597.325 atau 75%, Kursus menjahit sebesar Rp. 90.865.775 atau 25%, Pada tahun 2011 menunjukkan dari Rp. 190.636.162,5 atau 100% jumlah zakat produktif yang dialokasikan untuk Modal Usaha sebesar Rp. 133.445.313,8 atau 70%, Kursus menjahit sebesar Rp. 57.190.848,75 atau 30%.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rasmuddin, S.Ag, sebagai Kepala Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 4 Agustus 2012 yang bertempat di Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, beliau menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan

kemiskinan yaitu dengan menyalurkan dana zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif, yaitu bantuan yang langsung di konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* dengan berorientasi pada aspek produktif, yaitu penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya mesin jahit, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya.

Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan kepada *mustahik* belum sepenuhnya bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Makassar, akan tetapi sangat memberi manfaat dan dapat mengurangi beban hidup para *mustahik*. Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak. Mengapa dikatakan demikian, karena tergantung dari para mustahik bagaimana cara mengelola atau memanfaatkan bantuan tersebut.

Kemudian oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, dana zakat itu di wujudkan dalam bentuk pemberian keterampilan dan modal untuk diberikan kepada para mustahik setelah kebutuhan pokok delapan asnaf terpenuhi.

Hasil wawancara selanjutnya adalah dengan beberapa *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan. (wawancara, tanggal 8 juli s/d 15 juli 2012).

Tabel VI.
Nama-Nama *Mustahik* Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Dari
Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.

No	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	Amin	25 Tahun	Montir	Jl. Dr. Ratulangi No 214
2.	Selfiani	30 Tahun	Jualan campuran	Jl. Dr. Ratulangi 1 No 14
3.	Amir	47 Tahun	Jualan campuran	Jl. Dr. Ratulangi Lr. 1
4.	Dg. Kamma	40 tahun	Jualan ikan	Jl. Dr. Ratulangi Lr. 1
5.	Herlina	34 Tahun	Jualan campuran	Jl. Batua Raya 6 No. 22
6.	Hasniah	32 Tahun	Jualan campuran	Jl. Batua Raya 7 No. 4
7.	Tarto	37 Tahun	Jualan bakso	Jl. Muh. Tahir
8.	Sri Rustatik	34 Tahun	Jualan campuran	Jl. Muh. Tahir
9.	Muh. Nasir	47 Tahun	Jualan Campuran	Jl. Batua Raya 4 No. 9
10.	Misnawati	42 Tahun	Jualan campuran	Jl. Dr. Ratulangi 1 No. 16

Dengan adanya bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberikan kepada *mustahik* sangat membantu perekonomian mereka, karena dapat mendirikan usaha kecil-kecilan. Oleh sebab itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Cara pembayaran bantuan modal usaha ini yaitu diangsur selama 10 bulan tanpa adanya tambahan. Mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan ini maka dapat meringankan beban masyarakat, karena bantuan ini sangat bermanfaat. Akan tetapi bapak Muh. Nasir dan ibu Misnawati mengatakan bahwa bantuan modal usaha ini kurang bermanfaat karena bantuan yang diberikan sangat sedikit.

Selanjutnya, melalui keterampilan dan modal yang diterima tersebut diharapkan akan tercipta suatu kegiatan usaha semacam industri rumah tangga. Selain itu akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu.

Melalui pola pemberdayaan seperti itu, zakat harta orang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada *mustahik* yang lain sehingga nilai harta zakatnya akan semakin bertambah. Bagi *mustahik* yang memperoleh keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin meningkat, sehingga lambat laun predikat *mustahik* akan berubah menjadi *muzakki*.

Ketika konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapannya mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang ada. Penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu solusi masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat. Namun dalam perjalanannya pemberian zakat dengan pola produktif ini membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik.

Jadi melalui pemberdayaan dana zakat, orang yang kurang beruntung akan terangkat taraf hidupnya dari kehidupan yang serba kekurangan menjadi kehidupan yang lebih sejahtera.

D. Kendala atau Hambatan dalam Pengelolaan Zakat

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rasmuddin. S. Ag, sebagai Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 4 Agustus 2012 yang bertempat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi

Selatan, dijelaskan tentang kendala dan hambatan yang sering ditemukan dalam pengelolaan zakat antara lain karena:

1. Secara umum pemahaman umat Islam tentang zakat masih sangat minim, di banding dengan pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syari'at lainnya.
2. Fiqih zakat dipelajari dan dipahami masyarakat tidak sesuai dengan kondisi yang ada, dengan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan, zakat profesi, sehingga banyak sumber dana yang belum tergali.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah.
4. Masih adanya kelemahan dalam aspek SDM pengelola zakat.

Oleh sebab itu, sejalan dengan dipaparkannya kendala atau hambatan yang di hadapi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rasmuddin, S.Ag, menuturkan bahwa solusi atau penyelesaian masalah terhadap kendala atau hambatan dalam pelaksanaan zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah, dan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, untuk melakukan suatu perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam hal pelaksanaan zakat bahkan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi, baik oleh segi peraturan pengelolaan zakat, maupun oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sehingga pembayaran zakat oleh para muzakki, dapat terlaksana sesuai yang telah ditargetkan.

Dengan demikian, kita sebagai masyarakat maupun lembaga pemerintahan saat ini adalah mempertegas Undang-Undang pengelolaan zakat, memperbaiki kualitas amil zakat serta membuat berbagai standar manajemen untuk panduan pengelolaan dan pengawasan kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor terjadinya kemiskinan di Kota Makassar yaitu:
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah.
 - b. Cara berfikir yang masih tradisional dan konservatif akan hal-hal yang baru.
 - c. Tidak seimbangnya orang yang datang di Kota Makassar dengan lowongan pekerjaan yang ada.
 - d. Para urbanisasi tersebut tidak memiliki pekerjaan yang jelas, oleh sebab itu mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
2. Pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan, dengan menyalurkan dana zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* secara konsumtif, yaitu bantuan yang langsung dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada *mustahik* dengan berorientasi pada aspek produktif, yaitu penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya mesin jahit, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka adapun hal yang disarankan yaitu kita sebagai masyarakat maupun lembaga pemerintah atau pengelola dana zakat. Keberadaan badan pengelola zakat termasuk di antaranya Badan Amil Zakat (BAZ), diharapkan mampu menjembatani antara *muzakki* kepada *mustahik* dalam penyaluran zakatnya. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pengelola zakat diharapkan dapat memanajemen dana zakat yang terkumpul hingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Penyaluran dana zakat yang terbagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif, memerlukan proporsi dan konsep yang jelas. Pemberian zakat produktif mengharapakan bahwa *mustahik* yang akan telah menerima dana zakat dapat menjadi *muzakki* baru yang dapat menyalurkan zakatnya kembali. Ketika konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapannya mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang ada.

Daftar Pustaka

- Al-Aziz, Moh. Saifulloh. *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2007.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasby. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustak Rezki Putra, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*, Makassar: Badan Pusat Statistik, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1998.
- El-Bantanie, M. Syafi'ie. *Zakat, Infak & Sedekah*, Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Fakhrudin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Pres, 2008.
- Gassing, A. Qadir HT dan Wahyuddin Halim. *Pedomen Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis*. Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Ibnu Syarif, Muzar dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1997.
- Kementrian Agama, *Zakat*, Makassar: Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2010.
- Malahyati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasi Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*, Makassar: Aluddin Press, 2011.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- M. Echols, John & Hassan Syadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- M. Ralona, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jl. Gunung Sahari III/7: Gorga Media, 2006.
- Nuruddin, Amiur. *Dari Mana Sumber Hartamu?*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh I*, (Logos, Departemen Agama, 1995.
- P. Soedarno, *Ilmu Sosial Dasar Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal WaTamwil*. Yogyakarta; UII Press, 2004.
- Ridwan Mas'ud, Muhammad. *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Tim Penusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Thayib, Agus, Afifi dan Shabira Ika. *Kekuatan Zakat “Hidup Berkah Rezeki Melimpah”*, Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Nur Rosmiati, Lahir pada hari Rabu tanggal 27 Juli 1990 di Panyampa, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar (POL-MAN) Prov. Sulawesi Barat. Anak pertama dari enam bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Suami Istri Abd. Radjab. N dengan Nursiah.

Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada tahun 1996 di Sekolah Dasar Negeri 008 Panyampa Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat, selesai pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlah Lampoko Campalagian, selesai pada tahun 2003. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMA Pesantren Modern Al-Ikhlah Lampoko Campalagian, dan selesai pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan studi di Pesantren Modern Al-Ikhlah, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Makassar yang memang menjadi keinginan dan pilihan penulis sendiri yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, mengambil program SI dengan memilih jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada perguruan tinggi tersebut sebagai bekal penulis dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Penulis berharap apa yang didapatkan berupa ilmu pengetahuan, penulis dapat mengamalkannya di dunia dan mendapat balasan Rahmat dari Allah SWT, di kemudian hari, serta dapat membahagiakan kedua orang tua, nenek dan semua keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan segala dukungan yang tiada hentinya.